

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Teori*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara satu pihak atau lebih sebagai prinsipal dengan pihak lain sebagai agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal biasanya adalah pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan, sedangkan agen adalah manajer atau karyawan yang menjalankan aktivitas operasional atas nama prinsipal. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang bertujuan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Namun, hubungan ini sering menimbulkan asimetri informasi, dimana agen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan dan operasi perusahaan dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga muncul biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dapat berupa *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*, yang masing-masing timbul dari upaya meminimalisir perbedaan antara kepentingan agen dan prinsipal (Hendrastuti & Harahap, 2023).

Dalam konteks kualitas laporan keuangan, teori agensi menjadi relevan karena laporan keuangan merupakan sarana utama bagi prinsipal untuk memperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Dengan

kata lain, penerapan prinsip-prinsip pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, serta komitmen organisasi sebagai bagian dari mekanisme untuk mengelola biaya keagenan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian, teori agensi memberikan landasan konseptual bahwa hubungan prinsipal dengan agen dan mekanisme pengendalian dalam organisasi secara langsung memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan yang akurat dan andal menjadi indikator minimnya konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam perusahaan.

2.1.2 Kualitas laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan laporan terstruktur mengenai aktivitas yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan ini mencakup informasi tentang transaksi dan posisi keuangan yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran akurat mengenai kondisi keuangan entitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui beberapa kriteria menurut PP No. 71 Tahun 2010, antara lain sebagai berikut:

2.1.2.1 Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan apabila informasi yang disajikan dapat mencerminkan peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, serta prediksi masa depan, sehingga mampu menjadi dasar bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), disajikan tepat waktu, dan disajikan secara lengkap.

2.1.2.2 Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan. Informasi yang andal ditandai dengan penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan bersifat netral, sehingga dapat dipercaya oleh pengguna.

2.1.2.3 Dapat Dibandingkan

Informasi keuangan menjadi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya atau laporan entitas lain, baik secara internal maupun eksternal, dengan penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten.

2.1.2.4 Mudah Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan bentuk dan istilah yang mudah dipahami, sehingga pengguna dapat menangkap informasi yang relevan secara efektif.

Dalam konteks teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), laporan keuangan sektor publik merepresentasikan peran pemerintah sebagai agen yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyediakan informasi bagi pengguna informasi keuangan, yang berperan sebagai prinsipal. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan, sehingga pengguna informasi baik masyarakat, legislatif, maupun pemangku kepentingan lainnya dapat menilai akuntabilitas pemerintah dan membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan (variabel Y) mencerminkan efektivitas mekanisme pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

2.1.3 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan individu sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam proses perencanaan anggaran, dimana mereka berperan aktif, memberikan masukan, dan berkontribusi terhadap penyusunan keputusan anggaran (Brownell, 1982). Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa SDM tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memahami anggaran sebagai instrumen penting dalam pengendalian dan perencanaan organisasi.

Penyusunan anggaran yang melibatkan SDM secara partisipatif dapat mendukung penyajian informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan. Dengan keterlibatan SDM dalam proses perencanaan anggaran, laporan keuangan cenderung mencerminkan pemahaman yang lebih baik terhadap alokasi sumber daya, prioritas kegiatan, dan pengelolaan keuangan. Menurut Imelia *et al.* (2021) indikator pengukuran Partisipasi Anggaran adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Keterlibatan

Keaktifan SDM berpartisipasi dalam pekerjaan, dengan menunjukkan bahwa penyusunan anggaran sebagai hal yang utama, serta melihat pekerjaan penyusunan anggaran sebagai suatu yang penting bagi harga diri.

2.1.3.2 Pengaruh

Pengaruh yaitu memberikan manfaat terhadap suatu pekerjaan dan memiliki efek atau dampak yang timbul atas penyusunan anggaran.

2.1.3.3 Komitmen

Komitmen merupakan adanya loyalitas, sikap terhadap tugas tanggung jawab serta disiplin diri SDM dalam ikut terlibat penyusunan anggaran.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI yang efektif membantu terciptanya laporan keuangan yang andal dan akurat, karena sistem ini mendorong pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya mekanisme pengendalian internal yang baik, informasi keuangan yang disajikan dapat lebih terpercaya, sehingga mendukung kualitas laporan keuangan sebagai variabel penelitian utama. Indikator Sistem Pengendalian Internal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

2.1.4.1 Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai bertanggung jawab menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang kondusif, sehingga mendukung penerapan pengendalian internal serta manajemen yang baik.

2.1.4.2 Penilaian Resiko

Pengendalian internal melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko yang mungkin muncul dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi, untuk memastikan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

2.1.4.3 Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian bertujuan memastikan pelaksanaan arahan pimpinan secara efektif dan efisien, sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi.

2.1.4.4 Informasi dan Komunikasi

Instansi pemerintah wajib menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, baik keuangan maupun non-keuangan, yang berkaitan dengan peristiwa internal maupun eksternal. Informasi tersebut harus dicatat, dilaporkan tepat waktu, dan disampaikan secara efektif agar pimpinan organisasi dapat melaksanakan pengendalian dan pertanggungjawaban dengan baik.

2.1.4.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pelaksanaan pemantauan bertujuan mengevaluasi kinerja secara berkala, memastikan rekomendasi dari audit dan review lainnya dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh pimpinan instansi. Pemantauan dilakukan melalui pengawasan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut atas hasil audit.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Komitmen pegawai terhadap organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan organisasi. Pegawai yang memiliki tingkat komitmen tinggi cenderung termotivasi untuk bekerja secara maksimal, menunjukkan kesungguhan, dan berupaya mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, komitmen yang rendah dapat berdampak pada kinerja yang kurang optimal.

Menurut Tihajar *et al.* (2025), komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara

keanggotaan. Hernanda (2020), menambahkan komitmen organisasi dapat tumbuh disebabkan karena seseorang memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang ditandai dengan dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdikan pada organisasi. Menurut (Sulistianingrum & Mulyana, 2024) terdapat tiga indikator dari komitmen organisasi yaitu :

2.1.5.1 Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)

Komitmen yang muncul karena adanya ikatan emosional, keterlibatan, dan identifikasi karyawan terhadap organisasi.

2.1.5.2 Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*)

Komitmen yang didasarkan pada pertimbangan biaya jika meninggalkan organisasi, seperti kehilangan gaji, jabatan, atau kesempatan tertentu.

2.1.5.3 Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)

Komitmen yang muncul karena adanya rasa kewajiban moral untuk tetap bertahan dalam organisasi.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar pekerjaan. Kompetensi yang baik memungkinkan individu bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional dalam mencapai tujuan organisasi (Samsudin *et al.* 2024). Menurut Delanno dalam Khairiyah (2021), kompetensi sumber daya manusia dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

2.1.6.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan,

dan nilai-nilai tertentu. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki pegawai, termasuk relevansi bidang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalankan, dapat memengaruhi pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

2.1.6.2 Pelatihan

Pelatihan merupakan proses pengembangan kemampuan yang lebih spesifik dan berfokus pada peningkatan keterampilan tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara lebih efektif.

2.1.6.3 Pengalaman

Pengalaman kerja dapat diukur dari lamanya seseorang bekerja dalam bidang atau posisi tertentu. Pengalaman yang memadai membantu pegawai meningkatkan keahlian praktis serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan permasalahan yang muncul.

2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan kemajuan teknologi tidak terbatas pada penggunaan komputer semata, tetapi juga mencakup pemanfaatan jaringan internet dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta dalam penyampaian pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan serta memperluas akses penyampaian informasi keuangan kepada publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku aparatur, khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan, dalam menggunakan teknologi informasi untuk

mempermudah penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Teknologi informasi meliputi penggunaan perangkat komputer dan jaringan. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer dirancang untuk memperlancar aliran informasi, sehingga pengelola keuangan dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami.

Perangkat komputer terdiri atas perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang saling mendukung dalam pengolahan data keuangan. Sementara itu, jaringan berfungsi menghubungkan komputer satu dengan lainnya agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal membantu proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Dengan demikian, informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Rosita dalam khairiyah (2021), indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

2.1.7.1. Komputer

Komputer merupakan perangkat utama yang digunakan dalam pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data menjadi informasi yang dibutuhkan organisasi. Pemanfaatan komputer dalam pekerjaan dapat membantu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi maupun operasional.

2.1.7.2. Jaringan Internet

Jaringan internet merupakan media komunikasi dan pertukaran informasi yang memungkinkan akses data secara cepat dan luas. Pemanfaatan jaringan internet membantu pegawai dalam memperoleh informasi, berkomunikasi,

mengirim data, serta mengakses berbagai sistem informasi yang digunakan dalam organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat. Penelitian oleh (Sopian <i>et al.</i> , 2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bandung barat, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Bandung Barat.	• Penambahan variabel penyusunan anggaran • Objek penelitian yang berbeda
2.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kolaka (Nurdin <i>et al.</i> , 2024)	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Kolaka.	• Variabel yang diteliti berbeda yaitu penyusunan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah komitmen organisasi. • Objek

			penelitian berbeda
3.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel <i>Moderating</i> . (Setyaningrum dan Haryanto, 2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel dan Objek Penelitian
4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Heinrich dan Probohudono, 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.	• Variabel yang diteliti berbeda • Tempat penelitian yang berbeda
5.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Masprayoga <i>et al.</i> , 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	• Objek penelitian yang berbeda • Variabel penelitian yang berbeda
6.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi	• Ada 3 variabel penelitian

	Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian oleh (Kansah <i>et al.</i>, 2023)	sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi, sedangkan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi.	yang berbeda • Objek penelitian yang berbeda
7.	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Kualitas Review dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPKP Jawa Tengah). (Riyanto, 2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	• Tempat yang digunakan untuk penelitian berbeda • Variabel yang diteliti berbeda
8.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. (Imelia <i>et al.</i>, 2021)	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	• Penambahan variabel komitmen organisasi • Objek yang diteliti berbeda

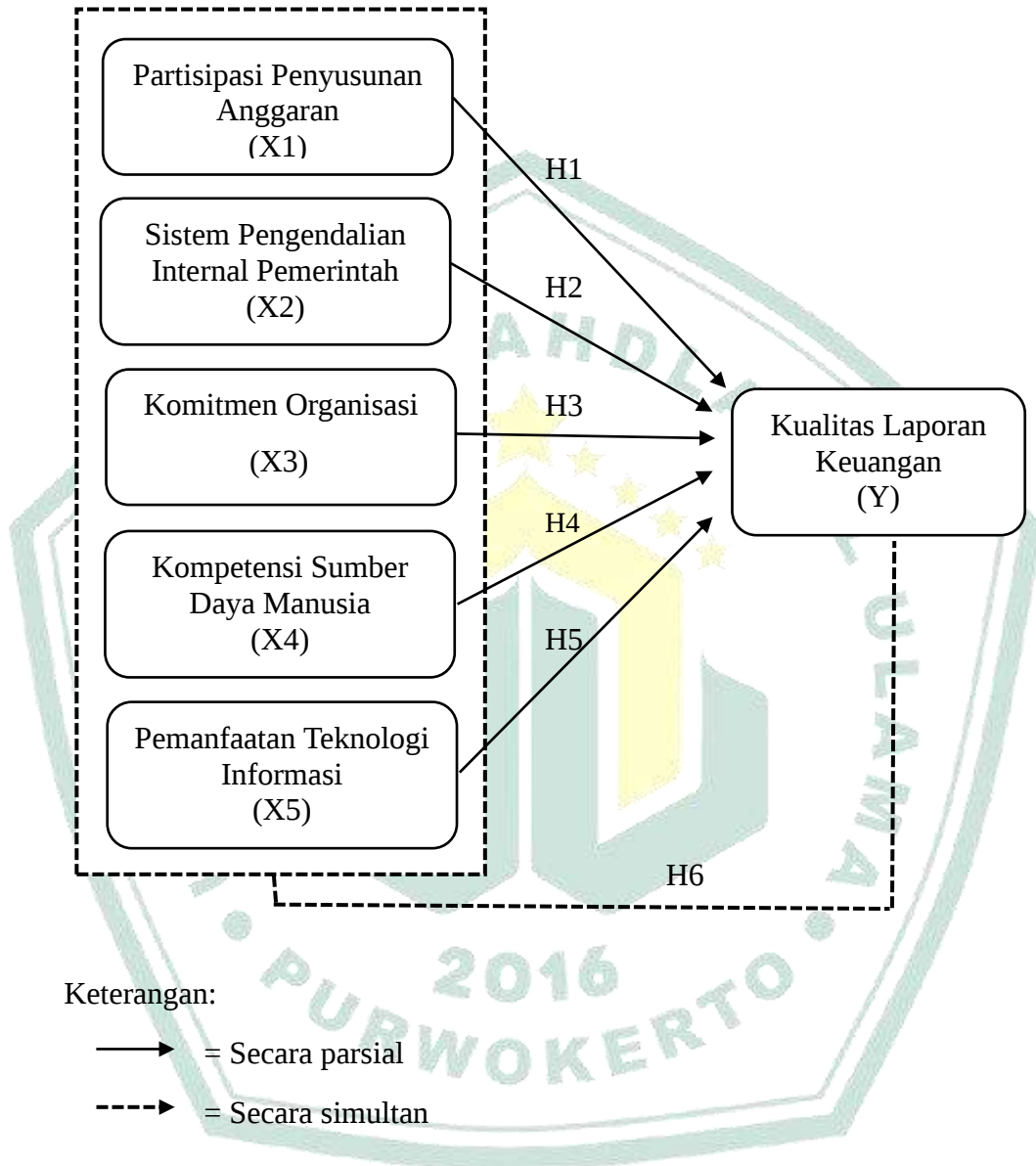
9.	Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang. (Saifudin dan Aprilia, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel komitmen organisasi berpengaruh negatif Terhadap kualitas laporan keuangan.	• Penambahan variabel penyusunan anggaran
10.	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe) (Tihajar <i>et al.</i> 2025)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe.	• Variabel yang diteliti berbeda • Objek yang diteliti berbeda.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran yang dirancang secara sistematis dan logis berdasarkan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu, yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini meliputi Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan aktif sumber daya manusia (SDM) dalam proses perencanaan, penetapan, serta evaluasi anggaran organisasi. Menurut Brownell (1982), partisipasi anggaran mencerminkan sejauh mana individu dalam organisasi memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, memengaruhi keputusan, dan turut menentukan arah kebijakan anggaran. Dengan demikian, partisipasi penyusunan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menggambarkan keterlibatan emosional dan tanggung jawab moral SDM terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran.

Dalam perspektif *agency theory* menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* berpotensi menimbulkan asimetri informasi akibat perbedaan kepentingan dan akses informasi dimana dalam hal ini mekanisme pengendalian diperlukan untuk menekan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Partisipasi penyusunan anggaran dapat berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengendalian karena keterlibatan aparatur mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga risiko perilaku oportunistik dapat diminimalkan (Jensen & Meckling, 1976).

Partisipasi anggaran juga meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang terlibat aktif memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan organisasi dan kebutuhan operasional sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih realistis dan tepat sasaran. Tingkat partisipasi yang tinggi menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap realisasi anggaran yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan

kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, dan disajikan secara tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imelia *et al.* (2021) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi aparatur dalam proses penyusunan anggaran, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Anggaran Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dijalankan untuk dapat mencapai tujuan bagi setiap organisasi atau lembaga. Sistem pengendalian internal dalam *agency theory* merupakan salah satu cara atau usaha yang dapat dilakukan agar meminimalisir suatu asimetri pada informasi melalui *monitoring cost* (Ningrum dalam Khairiyah, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian kebijakan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Apabila sistem pengendalian internal suatu organisasi rendah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam penyajian laporan keuangan akan besar. Dengan sistem pengendalian internal pemerintah yang tinggi dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan atau fraud dalam penyajian

laporan keuangan, dengan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan semakin tinggi. Menurut hasil penelitian Sopian *et al.* (2024), Heinrich & Probohudono (2023), Masprayoga *et al.* (2023), dan Riyanto (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Komitmen organisasional merupakan sikap yang diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, bekerja keras demi tercapainya tujuan organisasi, serta menerima nilai dan tujuan organisasi (Wardhana, 2024). Komitmen organisasi mengarah kepada sikap loyal seorang pegawai pada perusahaan. Dalam *agency theory*, dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen organisasi seorang pegawai maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas pegawai kepada perusahaan. Dengan demikian tingginya loyalitas seorang pegawai akan meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mengembangkan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. sedangkan pegawai yang berkomitmen rendah akan melakukan pekerjaannya dengan tidak maksimal. Dengan adanya komitmen terhadap organisasinya, maka setiap pegawai akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan (Saefudin & Aprilia, 2020)

Menurut penelitian yang dilakukan Sopian *et al.* (2024), dan Riyanto (2022) ditemukan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan. Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Komitmen organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.4 Pengaruh Komitmen Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan No. 71 Tahun 2010 terdapat empat karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan berkualitas, yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Untuk menjadikan laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas dengan memenuhi standar menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, maka diperlukan faktor pendukung yaitu dengan adanya pegawai yang kompeten di bidangnya sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif.

Dalam *agency theory* sumber daya manusia dinyatakan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi melalui *bonding cost*. sumber daya manusia memiliki korelasi terhadap sistem. Oleh karena itu, sumber daya manusia dituntut agar mempunyai keahlian dan keterampilan yang memadai di bidangnya yang bisa digunakan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan muncul karena adanya kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang memadai di bidangnya (Ningrum dalam Khairiyah, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sismiati & Sulaiman (2024), Nurdin *et al.* (2024) dan Kansah *et al.* (2023) menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki

pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan harus sesuai dengan tata kelola yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan juga menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik.

Berdasarkan *agency theory*, pemanfaatan teknologi informasi adalah salah satu cara dalam meminimalisir adanya suatu asimetri informasi dalam *bonding cost*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kinerja dalam menyalurkan dan mengelola informasi keuangan pada pihak pelayan publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan. Sehingga dalam proses penyusunan laporan keuangan bisa lebih cepat, tepat, dan akurat serta akan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik (Ningrum dalam khairiyah, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sopian *et al.* (2024), Nurdin *et al.* (2024), Setyaningrum & Haryanto (2024), Heinrich & Probohudono (2023), Masprayoga *et al.* (2023), dan Imelia *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan

Uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.6 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi, Komitmen Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, diperlukan sinergi dari berbagai faktor pendukung, di antaranya sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan partisipasi penyusunan anggaran. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan secara simultan memengaruhi proses penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif berperan penting dalam menjamin keandalan pelaporan keuangan melalui pengawasan dan evaluasi yang sistematis terhadap aktivitas keuangan. Komitmen organisasi menjadi landasan moral yang mendorong aparatur untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia menentukan sejauh mana pegawai memiliki kemampuan teknis dan profesional dalam mengelola serta menyusun laporan keuangan secara akurat. Di sisi lain, partisipasi penyusunan anggaran memberikan ruang bagi aparatur untuk berkontribusi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan

keputusan keuangan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil keuangan yang dicapai.

Berbagai penelitian mendukung hubungan simultan antar variabel tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopian et al. (2024), Nurdin et al. (2024), Setyaningrum & Haryanto (2024), Heinrich & Probohudono (2023), Masprayoga et al. (2023), dan Imelia *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari sinergi antara pengendalian internal yang baik, komitmen organisasi yang tinggi, kompetensi SDM yang memadai, dan partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₆ : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.